

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa jenis diantaranya Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Arti dari Hiburan itu sendiri adalah semua jenis Tontonan, Pertunjukan, Permainan, dan/atau Keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sebelum membahas Pajak Hiburan secara lebih terperinci, kita sebaiknya perlu terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya yang menjadi bagian dari pajak daerah.

Salah satu yang ditempuh oleh Pemerintah adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem Manajemen Perpajakan di Indonesia. Pemberian Otonomi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah, khususnya Kota Surabaya. Dimana Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kewenangan, hak, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga kota Surabaya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Hiburan Adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Pajak Hiburan Juga adalah semua jenis Tuntutan, Permainan, atau Keramain yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan dimaksud adalah Tontonan Film, Pagelaran kesenian, Musik, Tari atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya, Pameran, Diskotik, karaoke, klab malam, Pertandingan Olahraga, dan lain-lain.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan. Sedangkan wajib Pajak Hiburan Adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Hiburan. Tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan adalah sebesar 35%.

Menurut penelitian Hardiyanti (2013) Surabaya juga menerapkan undang-undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di Surabaya. Sebagaimana dalam penelitian Vira Hardiyanti, pada tahun 2013 dengan judul menuliskan Pemerintah Surabaya melakukan pemungutan

pajak daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah diwilayahnya. Guna memperlancar pembangunan nasional dan mengelolah pendapatan daerahnya maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari Pemungutan Pajak Daerah. Peran Pemungutan Pajak Daerah di Surabaya sangatlah penting bagi kas penerimaan Pemerintahan maka dari itu Pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah di wilayah Surabaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penulisan tugas akhir ini juga tidak terlepas dari penelitian sebelumnya. Seperti menurut penelitian Maharani (2011) pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak hiburan, karena pajak hiburan

diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar bagi kelangsungan pembangunan daerah. Namun sepertinya pemerintah mengalami kesulitan-kesulitan dalam meningkatkan penerimaan dari Pajak Hiburan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan tepat waktu yang telah ditentukan. (Maharani, 2011)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai upaya peningkatan pajak hiburan oleh karena itu, peneliti memilih Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai tempat studi lapang yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan tugas akhir dengan judul “ **UPAYA PENINGKATAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA** ”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa upaya Peningkatan Pajak Hiburan Terhadap kota Surabaya
2. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan antara potensi Pajak Hiburan dan realisasi Pajak Hiburan yang terdapat di kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1. Manfaat bagi penulis:

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Surabaya.

2. Manfaat bagi universitas :

Diharapkan dari penelitian ini dapat disusun sebuah tugas akhir yang baik sehingga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yaitu mengenai pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD kota Surabaya.

3. Manfaat bagi pemerintah daerah kota Surabaya:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah daerah kota Surabaya, khususnya pekerjaan umum untuk memberikan pelayanan Pajak Hiburan yang lebih baik kepada masyarakat kota Surabaya itu sendiri.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya:

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Hiburan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan suatu masalah yang kompleks dan terkait agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas agar dapat membantu dalam pemecahan masalah.

Pada bagian ini penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan pada upaya peningkatan pajak hiburan terhadap dinas pendapatan kota Surabaya pada tahun 2012-2016.

Pada umumnya permasalahan ini tidak terlalu jauh dari kehidupan disekitar kita. Wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak karena sesuatu yang terjadi pada mereka. Ada beberapa hak yang

tidak memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu pajak yang dimiliki wajib pajak terkena suatu masalah. Ini sangat merugikan negara, ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan masyarakat, tetapi kurang adanya keaktifan dari petugas pajak maupun wajib pajak.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam studi lapang ini, metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan guna mencapai tujuan penulisan. Ada tiga metode pengumpulan data, yakni :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Pada peneliti ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau subjek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengenai aspek-aspek apa saja yang harus dibahas. Dengan pedoman demikian pewawancara harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara diadakan.

b. Observasi

Metode observasi yang kami teliti ini dengan menggunakan metode observasi langsung yang dimana dilakukan dengan melihat secara langsung, dan

mengamati objek untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

serta dapat melakukan penyesuaian data yang telah dioperasi sebelumnya dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh secara kenyataan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengambil arsip atau dokumen yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan Pajak Hiburan dan dijadikan acuan untuk penulisan tugas akhir